

**STATUS HUKUM
DANA TALANGAN HAJI BAGI CALON JAMAAH HAJI**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :
DELLA EDWINAR
NIM. 115010107111065



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**STATUS HUKUM
DANA TALANGAN HAJI BAGI CALON JAMAAH HAJI**

**DELLA EDWINAR
NIM.115010107111065**

Nama Pembimbing 1 : A. Rachmad Budiono, Dr, S.H, M.H

Nama Pembimbing 2 : Siti Hamidah, S.H, M.M

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Email : dellaedwinar@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia memberikan produk baru yang memfasilitasi setiap muslim di Indonesia untuk dapat mendaftarkan dirinya berhaji dengan fasilitas dana talangan haji dari lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Berdasar Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH kepada calon jamaah haji dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah/calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat. Produk dana talangan haji merupakan solusi bagi sebagian muslim yang tidak dapat mencukupi biaya haji secara tunai dengan berdasar prinsip Qard wal Ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan, dalam arti kata, pihak bank menjaga jaminan yang diberikan oleh nasabahnya.

Kata kunci : haji, dana talangan haji, calon jamaah haji, pembiayaan

ABSTRACT

The development of Islamic financial institutions in Indonesia to provide new products that facilitate every Muslim in Indonesia to be able to register themselves with the hajj pilgrimage bailout facility of Islamic financial institutions, both banks and non-banks. Based on Article 1, paragraph 4 of Regulation of the Minister of Religion No. 30 of 2013 concerning Beneficiary Bank Deposit Cost Hajj, Hajj is that the bailout funds provided as a temporary relief without wearing rewarded by the Beneficiary Bank Deposit (BPS) BPIH to pilgrims for the purpose of provide convenience to customers / prospective

customer financing to acquire the portion of the Hajj pilgrimage to the requirements easier and quicker process. Products bailouts Hajj is a solution for some Muslims who can not meet the cost of the pilgrimage in cash at wal Qard Ijarah based on the principle, that the contract of bank lending to customers, along with assignments in order to keep the bank guarantee deposit of goods, in the sense of the word, the maintaining bank guarantees given by customers.

Keywords: *Hajj, bailouts Hajj, pilgrims, financing*

A. Pendahuluan

Adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk menerapkan sistem perbankan ganda atau *dual banking system*, yaitu penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara paralel.¹ Keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang secara paralel memiliki hubungan keuangan yang terbatas satu sama lain akan menciptakan diversifikasi risiko keuangan secara beragam, yang akhirnya dapat mengurangi problem risiko sistemik pada saat terjadi krisis keuangan. Artinya, pengembangan bank syariah dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional.²

Saat ini banyak sekali Bank syariah yang sudah berdiri di Indonesia, semua bank syariah saling bersaing dalam membuat produk mereka, dan juga memberikan layanan terbaik kepada masyarakat (nasabah).³ Banyak produk-produk yang telah diciptakan Bank syariah antara lain : produk pembiayaan, penghimpunan dana, ataupun produk jasa. Semua produk ini ditujukan untuk melayani masyarakat (nasabah).

¹Abdul Gani Abdullah, **Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia**, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM, 2003.

² Ryan Kiryanto, **Konversi Bank Konvensional Ke Bank Syariah**, Suara Karya, hlm. 2-6, 2001.

³Abdul Aziz Dahlan, **Ensiklopedi Hukum Islam**, Jakarta: PT Ichtiar Baru Vanvoeve, 1997.

Sementara itu, jika wilayah ekonomi dan bisnis dikaitkan dengan ibadah haji, hal ini akan lebih kompleks lagi. Salah satu hal yang sangat terasa di masyarakat berkaitan dengan ibadah haji adalah kemampuan finansial masyarakat dalam usaha memenuhi kewajiban ibadah haji tersebut. Biaya ibadah haji yang tidak sedikit bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas mungkin bukan menjadi hambatan, mereka bisa mendaftar secara langsung kapan saja. Namun, bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, perlu banyak pertimbangan untuk bisa melaksanakan ibadah haji.⁴ Salah satu cara yang bisa mereka gunakan adalah dengan menabung sedikit demi sedikit dalam tempo waktu yang cukup lama untuk bisa mendaftar menjadi calon jama'ah haji.

Dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, muncul terobosan produk yang memfasilitasi setiap muslim di Indonesia untuk dapat mendaftarkan dirinya berhaji dengan fasilitas dana talangan haji dari lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Berdasar Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH kepada calon jamaah haji. Produk dana talangan haji merupakan solusi bagi sebagian muslim yang tidak dapat mencukupi biaya haji secara tunai dengan berdasar prinsip *Qard wal Ijarah*, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang

⁴A Rahman Ritonga dan Zainuddin, **Fiqih Ibadah**, Jakarta : Gaya Media Pratama, hlm. 209, 2002.

diserahkannya, dalam arti kata, pihak bank menjaga jaminan yang diberikan oleh nasabahnya.⁵

Tujuan dikeluarkannya produk ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah/calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat.⁶ Sementara, bagi pihak Perbankan Syariah sendiri, pembiayaan ini diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan konsumtif syariah, meningkatkan jumlah nasabah dan juga yang pasti meningkatkan profitabilitas pembiayaan dari sebuah lembaga Perbankan Syariah. Beberapa Bank Syariah seperti Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memberikan layanan produk ini kepada masyarakat. Di sisi yang lain, keberadaan dana talangan haji dirasakan tidak sejalan dengan ruh syariat Islam yang menganjurkan kaum muslimin dari berhutang.⁷ Hal inilah yang menjadi polemik di berbagai instansi perbankan dengan Pemerintah.

B. Permasalahan Hukum

Apa status hukum dana talangan haji bagi calon jamaah haji?

C. Pembahasan

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Menurut salah satu pendapat bahwa penelitian secara yuridis normatif, yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari

⁵www.wordpress.com “Problematika Dana Talangan Haji” diakses pada tanggal 10 September 2014 11:12

⁶Roy Franedy (ed.), “Pemerintah Akan Melarang Dana Talangan Haji”, dalam <http://keuangan.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-tertibkan-dana-talangan-haji> diakses pada tanggal 10 September 2014 00:28

⁷A. Djazuli, 2011, **Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis**, Jakarta : Kencana, hlm.33

asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum sesuai dengan suatu kasus tertentu.⁸ Dengan digunakannya penelitian ini peneliti akan menganalisis status hukum dana talangan haji di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani terkait talangan haji bagi calon jamaah.⁹ Dalam penelitian ini juga digunakan *Case Approach* atau pendekatan kasus. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mengetahui perihal status dana talangan haji. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.¹⁰

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara jelas fakta atau bahan hukum yang di peroleh dari lapangan maupun kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan di cari jalan pemecahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Cara ini digunakan penyusun guna mengetahui bagaimana hukum Islam memandang produk talangan haji.

⁸Sumitro, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung : Mandar, hlm. 86

⁹Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.95

¹⁰*Ibid*, hlm.321

1. Pengaturan Haji di Indonesia Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 34 Tahun 2014, menjelaskan bahwa Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jamaah Haji, sehingga Jamaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Penyelenggaraan Ibadah Haji pada dasarnya mencakup tiga dimensi penting, yaitu Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan. Ketiga dimensi tersebut direpresentasikan ke dalam bagian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH),¹¹ Pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Penetapan BPIH dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan oleh DPR RI, yang selanjutnya digunakan untuk keperluan penyelenggara ibadah haji tersebut. Dengan kata lain, BPIH disusun secara konsultatif antara Pemerintah dengan DPR RI.

Pada tahun 2004, Kementerian Agama memberlakukan sistem pembayaran setoran awal untuk BPIH. Para calon jamaah menyetorkan dana

¹¹<http://www.daftarhajiumroh.com/biayahaji/> diakses pada tanggal 16 Desember 2014

mereka ke 27 bank penerima setoran (BPS) awal. Tahun 2014 ini, Kementerian Agama (Kemenag) ini menetapkan 17 bank nasional yang dinyatakan sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).¹² Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Abdul Djamil menyebutkan, 6 dari 17 BPS BPIH 2014 itu adalah bank umum syariah.

Penyelenggaraan ibadah haji terdiri dari 2 macam, yaitu Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler atau yang biasa disebut dengan Ongkos Naik Haji (ONH Biasa) dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus atau yang biasa disebut dengan ONH Plus. ONH Biasa adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.¹³ Sedangkan ONH Plus Adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus yang pelayanan, pengelolaan, dan pembiayaannya bersifat khusus seta mendapat izin dari Menteri Agama. Pelayanan dan pengelolaan yang bersifat khusus meliputi waktu pelaksanaan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, dan bimbingan ibadah haji.

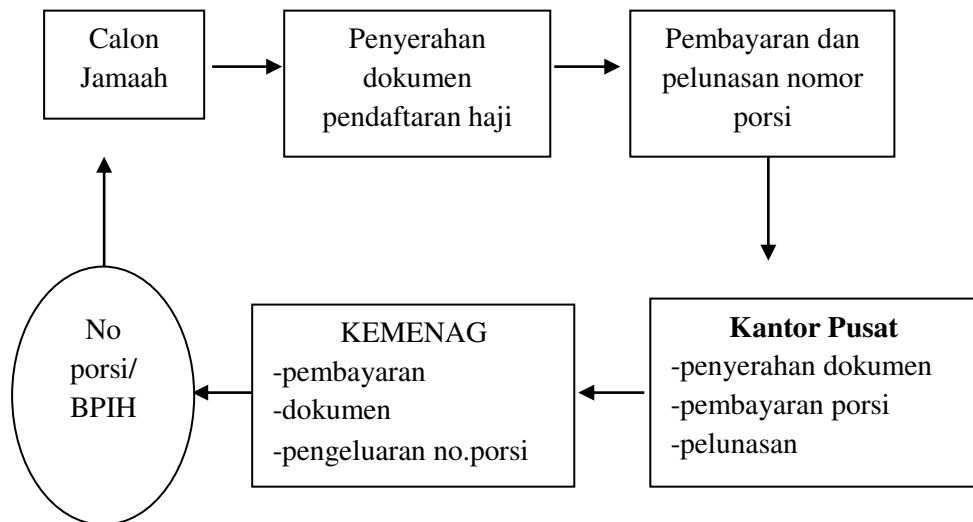
BPIH untuk haji khusus (ONH Plus) ditetapkan Pemerintah lebih tinggi daripada haji reguler. Karena terdapat perbedaan yang signifikan atas fasilitas yang dapat dinikmati oleh calon jamaah haji. Dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus ini, Pemerintah bekerja sama dengan swasta yaitu perusahaan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh yang telah mendapat izin dari

¹²<http://www.kemenag.go.id/> diakses pada 25 Desember 2014

¹³Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

Menteri Agama. Disamping membayar besarnya BPIH yang telah ditetapkan, jamaah haji harus menanggung biaya lain yang tidak termasuk dalam komponen BPIH, yaitu biaya pemeriksaan kesehatan, perjalanan dari daerah asal ke asrama embarkasi dan sebaliknya. Jumlah pembayaran BPIH di setiap propinsi berbeda tergantung daerah embarkasi masing-masing daerah yang telah ditentukan berdasarkan zona propinsinya.¹⁴

Gambar 1. Skema Pendaftaran Haji



Sumber : Data Primer,diolah, 2014

¹⁴<http://www.daftarhajiumroh.com/biayahaji/> diakses pada tanggal 19 Desember 2014

2. Pengaturan Dana Talangan Haji Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pembiayaan dana talangan haji merupakan suatu proses penyerahan dari pihak bank yang memberikan dana talangan haji kepada nasabah yang ingin mendaftarkan haji di Kementerian Agama, tetapi dananya belum mencukupi untuk membayar BPIH untuk mendapatkan porsi haji, kemudian bank syariah yang memberikan dana talangan haji itu kepada nasabah untuk mendapat *waiting list* (porsi haji) di Kementerian Agama.

Salah satu contoh dana talangan haji yang masih digunakan di perbankan syariah adalah Bank Syariah Mandiri. Di dalam Bank Syariah Mandiri aplikasinya tidak sesuai dengan fatwa DSN karena semakin tinggi dan qard maka semakin tinggi pula fee/ujrah sedangkan seharusnya fee ujarah tidak mengalami perubahan walaupun jumlah dana qard berbeda-beda anatar nasabah. Syarat yang ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan dana talangan haji sangat mudah, hanya melampirkan fotocopy KTP suami/isteri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy Akta Nikah dan membuka Tabungan Mabrur.¹⁵

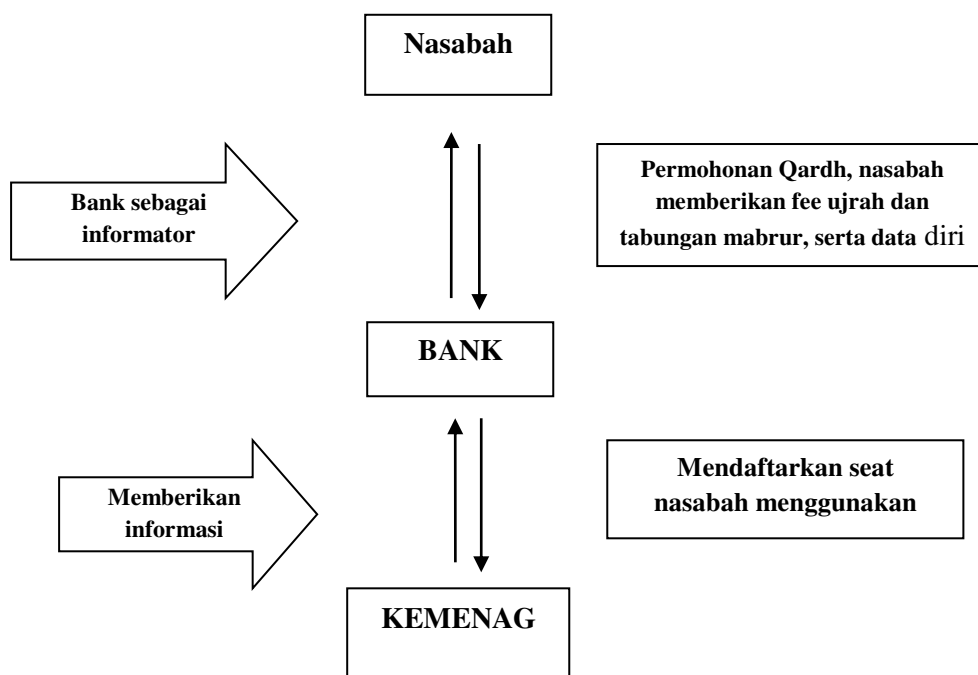
Dari beberapa kasus talangan haji di bank, mereka menerapkan sistem qardh (talangan), dengan pelunasan sebesar pokok pinjaman. Artinya tanpa kelebihan atas pokok. Sampai di sini kita bisa menilai, bank tidak menerapkan bunga pinjaman untuk talangan haji ini. Atau dengan bahasa lebih tegas, bank tidak membebani riba (baca: bunga) untuk transaksi ini.¹⁶Tetapi dalam kasus

¹⁵Skripsi Nur Uyun, UIN Malang “**Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji**” Pada PT. BSM Cabang Malang, 2012

¹⁶<http://www.konsultasisyariah.com/hukum-haji-dengan-hutang/> diakses pada 21 Desember 2014

talangan haji bank, nasabah dibebani dengan ujah, atau sebagian bank menyebutnya biaya administrasi. Sebenarnya tidak ada beda antara kata ujah dengan biaya administrasi, karena ujah sendiri artinya upah. Dengan kata lain, biaya administrasi di bank merupakan upah yang kita berikan kepada bank atas fasilitas bank yang diberikan kepada kita. Ujah atau biaya administrai yang ditetapkan bank untuk dana talangan haji, sangat jauh dari biaya realistis. Tingginya daftar tunggu (*waiting list*) calon jamaah haji di Indonesia membuat Kementerian Agama memperketat peraturan dana talangan haji yang disalurkan oleh perbankan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013, pengembalian dana talangan haji paling lama 1 tahun. Peraturan Menteri Agama ini mengatur bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji, hanya berlaku untuk dana talangan haji saja dan tidak berlaku untuk tabungan haji.

Gambar 2. Prosedur Dana Talangan Haji



3. Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji

Hasil Ijtima' Ulama IV Masalah Fikih Kontemporer memberikan ketetapan hukum terkait dengan dana talangan haji dan istitha'ah (mampu) calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji :

1. Hukum pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah adalah diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan untuk mengikuti/taat pada aturan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, yang ketentuannya antara lain : LKS hanya mendapat ujah (fee/upah) atas jasa pengurusan haji, sedangkan qardl yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan.
2. Istitha'ah adalah syarat wajib haji (bukan syarat sah haji), Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Namun demikian, kaum muslimin tidak sepatutnya memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar istitha'ah dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini. Sebaiknya yang bersangkutan tidak menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS dilunasi.
3. Pihak pemberi dana talangan haji wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji tersebut dari sisi

kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/istri serta tenor pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tidak terabaikannya kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab nasabah seperti nafkah keluarga.

4. Pemerintah c/q Bank Indonesia boleh memberlakukan kebijakan pembatasan kepada perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dana talangan haji bila diperlukan.

Selain itu, dana talangan haji telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, melalui fatwa DSN-MUI No 29/2002. DSN MUI adalah lembaga otoritas tertinggi dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, yang terdiri dari para ulama dan pakar-pakar syariah (guru besar) yang berkompeten. Yang lebih penting, dana talangan haji itu terbebas dari unsur riba dan bunga. Karena itu menurut saya, bank-bank konvensional tidak boleh menerima setoran haji dan memberikan talangan, Praktek ini salah besar, karena bank konvensional menggunakan instrumen bunga. Jika sesuai syariah dengan mengikuti fatwa DSN-MUI, bank-bank syariah penerima setoran boleh melakukan pengurusan haji dan mendapat *fee* pengurusan atas dasar akad ijarah atau bekerja untuk mendapat *fee/ujrah*. Jika ada praktek akad dana talangan yang dipermasalahkan pemerintah atau tokoh masyarakat, perlu diseminarkan bersama Dewan Syariah Nasional untuk membahasnya.

Pembiayaan dana talangan haji yang dikeluarkan dan diterapkan oleh bank – bank syariah memiliki multi masalah bagi banyak pihak yang ingin menunaikan ibadah haji. Yang dimaksud multi masalah yaitu mendatangkan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, bagi

rakyat, bangsa, negara, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan syariah lainnya. Dengan kata lain, dana talangan haji adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada masyarakat calon jamaah haji untuk mendapatkan porsi haji. Dan untuk jasa peminjaman itu, pihak bank berhak mendapatkan semacam 'uang jasa', yang tentunya menjadi sebuah transaksi yang bersifat *profit margin* (laba bersih) tersendiri dalam bisnisnya.

Justru yang jadi titik masalah pada 'bunga' dari pinjaman ini. Logikanya, tidak mungkin sebuah bank, meskipun berembel-embel syariah, tiba-tiba berbaik hati meminjamkan uang 25 juta begitu saja, kalau tidak pakai 'imbalan' apa pun. Yang namanya bank, pada hakikatnya adalah sebuah perusahaan. Dan sebuah perusahaan biar bagaimana pun juga bukan lembaga bantuan sosial. Maka logika dasar yang bisa kita pahami, bank harus dapat untung. Dan dalam hal ini, keuntungan didapat dari hasil meminjamkan uang kepada calon jamaah haji. Tinggal dicarikan hilah atau alibi agar apa yang awalnya riba dan haram kemudian bisa berubah jadi halal.

Sebenarnya dana talangan haji itu sah dan dihalalkan hanya saja bagaimana aplikasi dalam perbankan itu sendiri diterapkan. Apabila dilihat dari penggunaan akad sebenarnya dana talangan haji menggunakan satu akad yang dapat menimbulkan hukum akad yang lain bukan dua akad dalam satu transaksi. Dan mengenai fatwa DSN tentang besarnya qard (talangan) tidak akan mengubah besarnya ujrah atau fee atas sewa-menyewa.

D. Penutup

a. Kesimpulan

Status dana talangan haji adalah sebagai utang yang diberikan pihak bank kepada nasabah atau calon jamaah haji yang diperuntukkan untuk berangkat haji dengan menggunakan satu akad dalam satu transaksi.

b. Saran

Hendaknya Pemerintah mengambil suatu kebijakan untuk meningkatkan sosialisasi baik melalui media interpersonal (tokoh masyarakat, tokoh agama, fatwa mui, dll) maupun melalui media elektronik atau media cetak yang diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai fasilitas pembiayaan dana talangan haji yang diberikan Pemerintah melalui perbankan syariah sehingga tidak terjadi pro dan kontra.

Selain itu, menurut Penulis, Pemerintah tidak perlu menghentikan atau melarang program dana talangan haji, karena dana talangan manfaatnya multi-maslahah bagi ibadah kaum muslimin dan perekonomian umat, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Gani Abdullah, 2003, **Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia**, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM
- Abdul Aziz Dahlan, 1997, **Enkslopedi Hukum Islam**, Jakarta: PT Ichtiar Baru Vanvoeve
- A.Djazuli, 2011, **Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis**, Jakarta : Kencana
- A Rahman Ritonga dan Zainuddin, 2002, **Fiqh Ibadah**, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Sumitro, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung : Mandar
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Kencana : Jakarta
- Ryan Kiryanto, 2001, **Konversi Bank Konvensional Ke Bank Syariah**, Suara Karya.

INTERNET

- Hukum haji dengan utang**, <http://www.konsultasisyariah.com>
- Daftar haji dan umroh**, <http://www.daftarhajiumroh.com/biayahaji>
- Ibadah haji reguler dan khusus**, <http://www.kemenag.go.id/>
- Problematika dana talangan haji**, www.wordpress.com